

BAB VI

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

6.1 Simpulan

6.1.1 Simpulan Umum: Kesadaran ekologis, partisipasi warga negara, dan kebijakan pemerintah desa dalam memanfaatkan lingkungan rawa pasang surut membentuk sebuah sistem yang saling terkait dan saling memperkuat dalam mendukung keberlanjutan sosial-ekologis.

6.1.2 Secara khusus kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

6.1.2.1 Kesadaran warga negara dalam memanfaatkan lingkungan lahan basah rawa pasang surut sebagai pengembangan kapasitas adaptif yang berbasis pada pengetahuan lokal dan pengalaman langsung. Warga memiliki perhatian terhadap kelestarian lingkungan dan menerjemahkan pekarangan serta ekosistem sekitar sebagai sumber daya yang harus dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Kesadaran tidak hanya mencakup pemahaman tentang kondisi lingkungan saat ini, tetapi melibatkan pemaknaan terhadap nilai-nilai keberlanjutan lintas generasi. Kesadaran ekologis yang berkembang dalam masyarakat berfungsi sebagai modal sosial-ekologis yang dapat diwariskan dan mendasari tindakan kolektif dalam mendukung keberlanjutan.

6.1.2.2 Partisipasi warga negara di lingkungan lahan basah rawa pasang surut mencakup keterlibatan dalam struktur kelembagaan dan kebijakan pemerintah desa yang memberikan pengakuan atas kontribusi masyarakat dalam pemanfaatan lingkungan. Partisipasi lebih didorong oleh kearifan lokal dan solidaritas sosial yang tetap hidup melalui kebiasaan dalam bentuk gotong royong dan aksi sukarela. Transformasi partisipasi dipaksakan menjadi sukarela menunjukkan terjadinya peningkatan kesadaran kolektif yang mendalam terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat modal sosial yang mendukung keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan sosial.

Suroto, 2025

ECOLOGICAL CITIZENSHIP (KESADARAN, PARTISIPASI WARGA NEGARA, DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH) DALAM MEMANFAATKAN LINGKUNGAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

6.1.2.3 Kebijakan pemerintah desa dalam memanfaatkan lingkungan lahan basah rawa pasang surut menunjukkan kebijakan yang partisipatif, adaptif, dan transparan. Kebijakan tidak hanya berupa aturan formal, tetapi juga mencakup penguatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan. Kebijakan pemerintah desa yang transparan dan akuntabel memperkuat legitimasi sosial yang melahirkan kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan yang inklusif dan berbasis nilai lokal berfungsi sebagai dasar dalam memanfaatkan lingkungan secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, serta memperkuat ketahanan sosial-ekologis kawasan rawa pasang surut.

6.2 Implikasi

6.2.1 Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori keberlanjutan sosial-ekologis melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kesadaran, partisipasi warga negara, dan kebijakan pemerintah desa saling berinteraksi untuk mewujudkan lingkungan yang lebih hijau dan lestari. Penelitian ini juga memperluas dan menguatkan teori kesadaran, partisipasi warga negara, dan kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan lingkungan dengan menambahkan perspektif dinamika sosial-ekologis di tingkat lokal. Temuan ini menguatkan konsep *ecological citizenship* dari Dobson dalam konteks pemanfaatan lingkungan lokal, dengan menekankan pada pentingnya partisipasi aktif warga negara dan kebijakan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan sosial.

6.2.2 Praktis

Implikasi praktis dari penelitian ini mengarah pada penguatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan lingkungan. Penguatan kesadaran ekologis melalui pendidikan berbasis pengalaman langsung, peningkatan partisipasi sukarela, dan pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan lingkungan. Kebiasaan dalam bentuk gotong royong dan kearifan lokal yang ada di masyarakat dijadikan dasar dalam

merancang program-program keberlanjutan yang lebih konkret dan aplikatif. Penguatan hubungan antara kebijakan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat juga menciptakan keterlibatan yang lebih luas dalam pengelolaan sumber daya alam, menciptakan dampak jangka panjang secara lebih efektif.

6.3 Rekomendasi

6.3.1 Warga Masyarakat Kampung Iklim Lestari Kelurahan Sungai Miai

6.3.1.1 Warga masyarakat Kampung Iklim Lestari Kelurahan Sungai Miai perlu meningkatkan kesadaran ekologis melalui program penyuluhan dan edukasi lingkungan yang lebih terstruktur. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui pertemuan bulanan yang difasilitasi oleh komunitas kampung iklim atau lembaga kemasyarakatan setempat, di mana setiap pertemuan membahas tentang isu-isu lingkungan aktual, seperti pentingnya pengelolaan sampah, upaya penghijauan, serta konservasi sumber daya alam. Melalui diskusi terbuka dan penyampaian informasi berbasis data, warga diharapkan dapat memahami dampak lingkungan dari kegiatan sehari-hari dan cara-cara sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian alam. Pendidikan lingkungan ini juga dapat melibatkan berbagai pihak, seperti ahli lingkungan atau lembaga pemerintah untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pemanfaatan lingkungan tempat tinggal secara berkelanjutan.

6.3.1.2 Warga masyarakat diharapkan juga dapat meningkatkan partisipasi dalam program-program lingkungan yang sudah ada, seperti Kampung Iklim Lestari. Setiap individu harus berperan serta dalam kegiatan penghijauan, pengelolaan sampah, dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan secara rutin. Warga dapat mengorganisir kelompok kerja lingkungan yang fokus pada inisiatif spesifik, seperti penanaman pohon atau kampanye pengurangan sampah plastik. Kelompok kerja ini sebaiknya mengadakan pertemuan bulanan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan konkret yang terukur. Setiap kegiatan harus dievaluasi setiap tiga bulan untuk memastikan keberlanjutan dan pencapaian tujuan jangka panjang. Keterlibatan aktif warga dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan akan menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan yang lebih baik.

6.3.2 Komunitas Kampung Iklim Lestari Kelurahan Sungai Miai

6.3.2.1 Komunitas Kampung Iklim Lestari Kelurahan Sungai Miai perlu meningkatkan kesadaran ekologis dengan menyelenggarakan kegiatan edukasi berbasis perubahan iklim dan pelestarian lingkungan secara rutin. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi terbuka yang mengundang ahli lingkungan atau praktisi terkait untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai isu-isu perubahan iklim, adaptasi, dan mitigasi. Komunitas harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan mudah dipahami dan relevan dengan kondisi setempat, serta melibatkan warga dari berbagai lapisan usia. Kegiatan edukasi ini sebaiknya dilaksanakan setiap tiga bulan dengan melibatkan generasi muda dalam penyampaian pesan untuk menciptakan kesadaran yang lebih luas dan mendalam mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup.

6.3.2.2 Komunitas Kampung Iklim Lestari juga perlu meningkatkan partisipasi warga dengan mengaktifkan program-program berbasis lingkungan yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti pengelolaan sampah, penanaman pohon, atau pengembangan ruang terbuka hijau. Komunitas harus membentuk kelompok kerja yang terdiri dari para warga setempat untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan konkret yang dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Setiap kelompok kerja perlu merancang dan menjalankan kegiatan seperti pembersihan sungai atau penghijauan di sekitar area permukiman. Kegiatan ini harus dilakukan secara terencana dan terjadwal, dengan pertemuan kelompok kerja yang diadakan setiap bulan untuk mengevaluasi perkembangan dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Pencapaian hasil dari kegiatan ini perlu dievaluasi setiap enam bulan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Dengan melibatkan warga secara aktif, diharapkan dapat tercipta rasa tanggung jawab bersama terhadap kelestarian lingkungan di Kampung Iklim Lestari.

6.3.3 Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelurahan Sungai Miai

6.3.3.1 Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelurahan Sungai Miai perlu mengambil peran lebih aktif dalam mendorong pemanfaatan lingkungan tempat tinggal secara

berkelanjutan di tingkat desa. Lembaga ini harus mengorganisir berbagai kegiatan edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya pelestarian lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, pengurangan penggunaan plastik, dan penghijauan. Kegiatan edukasi ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan pelatihan yang melibatkan ahli lingkungan, pemerintah desa, serta organisasi lokal. Lembaga kemasyarakatan harus memastikan bahwa kegiatan edukasi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal, serta dapat dilaksanakan secara berkala setiap tiga bulan.

6.3.3.2 Lembaga Kemasyarakatan Desa juga perlu meningkatkan partisipasi warga dalam kegiatan lingkungan yang lebih terstruktur dan terkoordinasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk kelompok kerja lingkungan yang terdiri dari perwakilan warga, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait. Kelompok kerja ini bertugas merancang dan melaksanakan program-program berbasis ekologi, seperti pengelolaan sampah, penanaman pohon, dan pembersihan saluran air. Kegiatan tersebut sebaiknya dilaksanakan secara terjadwal dan rutin, dengan evaluasi berkala untuk mengukur dampak dan keberlanjutannya. Lembaga Kemasyarakatan Desa juga harus memastikan bahwa seluruh kegiatan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga termasuk generasi muda agar tercipta kesadaran kolektif yang mendalam terkait dengan pentingnya menjaga lingkungan di Kelurahan Sungai Miai.

6.3.4 Pemerintah Desa Kelurahan Sungai Miai

6.3.4.1 Pemerintah Desa Kelurahan Sungai Miai perlu segera menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kebijakan ini harus mencakup pengelolaan sampah, penghijauan, dan konservasi sumber daya alam yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik desa. Pemerintah desa diharapkan mengadakan pertemuan rutin dengan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan guna menyusun rencana aksi lingkungan yang konkret dan dapat diimplementasikan dalam jangka panjang. Rencana aksi tersebut dapat mencakup kegiatan seperti pembuatan ataupun pengaktifan bank sampah, pembangunan ruang

terbuka hijau, serta kampanye pengurangan penggunaan plastik.

6.3.4.2 Pemerintah Desa juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berbasis pada prinsip ekologi dengan melibatkan warga dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong pembentukan kelompok kerja berbasis lingkungan yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi lokal. Setiap kelompok kerja perlu diberikan pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan lingkungan, serta memastikan bahwa program-program tersebut dilaksanakan secara rutin dan terkoordinasi. Kegiatan ini sebaiknya dilaksanakan setiap bulan dengan evaluasi hasil setiap tiga bulan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya. Dengan pendekatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, diharapkan Pemerintah Desa Kelurahan Sungai Miai dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, hijau, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

6.3.5 Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin

6.3.5.1 Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin perlu meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan lingkungan yang diterapkan di tingkat kelurahan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, penghijauan, dan pelestarian sumber daya alam. Dinas ini harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan, serta dapat diakses oleh masyarakat untuk mendorong partisipasi aktif dalam memanfaatkan lingkungan tempat tinggal. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan, yang dapat dilakukan melalui kampanye, seminar, dan penyuluhan kepada masyarakat di tingkat kelurahan, termasuk Kelurahan Sungai Miai.

6.3.5.2 Dinas Lingkungan Hidup juga perlu memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan setempat untuk merumuskan program-program yang lebih terfokus dan aplikatif, seperti pembuatan dan pengelolaan bank sampah, pelatihan pengelolaan limbah, serta program

penghijauan. Program-program ini perlu diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan jangka panjang kota dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekologi. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan secara rutin dan terjadwal dengan evaluasi berkala setiap enam bulan untuk memastikan efektivitas dan dampak jangka panjang dari kebijakan yang diterapkan. Dinas Lingkungan Hidup harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga tercipta kesadaran kolektif yang lebih luas mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

6.3.6 Pemerintah Kota Banjarmasin

6.3.6.1 Pemerintah Kota Banjarmasin perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan ekologi dalam setiap kebijakan pembangunan yang dikeluarkan, baik di tingkat kota maupun kelurahan. Pemerintah kota harus menyusun kebijakan yang mendukung pemanfaatan lingkungan secara menyeluruh, termasuk pengelolaan sampah, pengurangan polusi, dan penghijauan, yang dapat diimplementasikan secara terkoordinasi antara berbagai instansi dan masyarakat. Pemerintah kota perlu memastikan bahwa kebijakan lingkungan yang diterapkan berbasis pada data dan riset terkini serta mencakup strategi adaptasi terhadap perubahan iklim yang relevan dengan kondisi lokal.

6.3.6.2 Pemerintah Kota Banjarmasin juga harus memperkuat kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat untuk merumuskan dan melaksanakan program-program lingkungan secara berkelanjutan, seperti pembangunan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah berbasis komunitas, serta kampanye pengurangan penggunaan plastik. Program-program ini sebaiknya dilaksanakan secara terjadwal dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik itu warga, organisasi lingkungan, maupun sektor swasta. Kegiatan ini harus dilakukan dengan evaluasi berkala setiap enam bulan untuk memastikan dampaknya terhadap pemanfaatan lingkungan yang lebih baik. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses perencanaan dan implementasi, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dan berkelanjutan dalam menjaga kelestarian lingkungan Kota Banjarmasin.

6.3.7 DPRD Kota Banjarmasin

6.3.7.1 DPRD Kota Banjarmasin perlu segera merumuskan dan mengesahkan regulasi yang mendukung pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Regulasi tersebut harus mencakup kebijakan yang memperkuat pengelolaan sampah, penghijauan, dan pelestarian sumber daya alam di tingkat kelurahan, serta memberikan insentif bagi masyarakat dan organisasi yang terlibat dalam upaya pemanfaatan dan pelestarian lingkungan. DPRD dapat mengadakan forum konsultasi publik yang melibatkan masyarakat, lembaga lingkungan, dan sektor terkait untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan dapat menjawab tantangan lingkungan yang dihadapi Kota Banjarmasin.

6.3.7.2 DPRD juga perlu memperhatikan urgensi pengawasan terhadap implementasi kebijakan lingkungan di tingkat kota dan kelurahan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah kota, Dinas Lingkungan Hidup, dan lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan kebijakan. DPRD harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterbitkan memiliki mekanisme pengawasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Program-program lingkungan yang tercantum dalam regulasi ini sebaiknya dilaksanakan secara terjadwal, dengan evaluasi berkala setiap enam bulan untuk memastikan efektivitasnya. Melalui peran aktif DPRD, diharapkan tercipta kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi lingkungan dan mendukung terciptanya Kota Banjarmasin yang lebih hijau dan berkelanjutan.

6.3.8 Prodi PPKn FKIP ULM

6.3.8.1 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) perlu mengintegrasikan materi mengenai Kewarganegaraan Ekologis ke dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Materi ini harus mencakup pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab ekologis sebagai bagian dari hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi aktif dalam upaya pemanfaatan dan pelestarian lingkungan. Prodi PPKn harus memastikan bahwa mahasiswa memahami hubungan antara nilai-nilai

Kewarganegaraan dengan isu-isu lingkungan, seperti perubahan iklim, pengelolaan sampah, dan penghijauan, serta bagaimana kebijakan publik dapat menciptakan perubahan positif bagi lingkungan.

6.3.8.2 Prodi PPKn perlu mengadakan pelatihan bagi para dosen agar mereka dapat menyampaikan materi yang relevan dengan konteks lokal dan global tentang Kewarganegaraan Ekologis dalam rangka melakukan implementasi terhadap kurikulum berbasis Kewarganegaraan Ekologis. Prodi PPKn sebaiknya juga mengadakan program kegiatan yang melibatkan mahasiswa dalam proyek-proyek nyata di masyarakat, seperti kampanye lingkungan, penghijauan, atau pengelolaan sampah berbasis komunitas. Kegiatan ini dapat dilakukan sebagai bagian dari tugas kuliah atau program pengabdian kepada masyarakat, dengan evaluasi setiap semester untuk memastikan bahwa mahasiswa benar-benar memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Kewarganegaraan Ekologis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, diharapkan mahasiswa PPKn ULM tidak hanya menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan.

6.3.9 Peneliti Selanjutnya

6.3.9.1 Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian mengenai peran pemerintah, lembaga masyarakat, dan individu dalam memanfaatkan lingkungan berbasis komunitas, serta dampaknya terhadap keberlanjutan ekosistem lokal. Penelitian harus memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambah variasi lokasi dan subjek yang lebih beragam guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam penerapan Kewarganegaraan Ekologis di berbagai konteks. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengembangkan metodologi yang lebih komprehensif, baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dan respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

6.3.9.2 Peneliti selanjutnya diharapkan juga lebih mendalami pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kesadaran, partisipasi, dan perilaku warga dalam upaya

pelestarian lingkungan, serta bagaimana partisipasi masyarakat dapat meningkatkan keberlanjutan program-program lingkungan. Penelitian tersebut dapat mencakup analisis terhadap program-program yang telah dilaksanakan, dengan fokus pada pencapaian tujuan jangka panjang dan hambatan yang dihadapi selama melaksanakan implementasi tersebut. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat meneliti hubungan antara Pendidikan Kewarganegaraan Ekologis di tingkat sekolah atau universitas dengan tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan lingkungan. Peneliti selanjutnya diharapkan juga menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses penelitian untuk meningkatkan validitas hasil dan dampak penelitian terhadap kebijakan yang berlaku.

6.4 Dalil Penelitian

- 6.4.1 Lingkungan ekologis rawa pasang surut berfungsi sebagai faktor penggerak yang secara langsung membentuk kesadaran ekologis warga melalui pengalaman ekologis. Kesadaran ekologis tidak hanya diperoleh melalui edukasi formal, melainkan melalui interaksi langsung dengan lingkungan yang mempengaruhi perilaku dan pemahaman warga terhadap isu-isu lingkungan.
- 6.4.2 Kesadaran ekologis yang muncul dari interaksi warga dengan pola ekologis rawa pasang surut terwujud dalam bentuk partisipasi ekologis kolektif. Partisipasi terwujud melalui pemanfaatan pekarangan rumah sebagai unit *agro-ekologi micro farming* secara berkelanjutan, serta melahirkan aturan informal di tingkat kampung yang berfungsi sebagai sistem regulasi ekologis lokal. Kesadaran ekologis tidak hanya mempengaruhi perilaku individu, tetapi membentuk struktur sosial dan norma yang mendukung keberlanjutan lingkungan secara kolektif.
- 6.4.3 Kegiatan ekologis yang telah berlangsung stabil di masyarakat kemudian dikristalisasi oleh pemerintah menjadi kebijakan lokal. Kebijakan bukan faktor yang membentuk perilaku ekologis, melainkan merupakan konsekuensi institusional dari kebiasaan yang sudah dijalankan oleh warga.

Kebijakan lokal muncul sebagai pengakuan dan pengaturan terhadap kegiatan ekologis yang telah ada pada tingkat kampung/komunitas.

6.4.4 Pola pengetahuan pembentuk *ecological citizenship* di Kelurahan Sungai Miai mengikuti alur *bottom-up*. Kesadaran ekologis yang berkembang pada tingkat komunitas menghasilkan partisipasi ekologis yang mendorong terciptanya kebijakan lokal. Proses pembentukan Kewarganegaraan Ekologis tidak bergantung pada negara sebagai penghasil kebijakan.

6.4.5 Model integratif *ecological citizenship* menegaskan bahwa lingkungan berperan sebagai sumber pengetahuan yang membentuk kesadaran ekologis, sementara warga bertindak sebagai sumber norma ekologis. Negara berfungsi sebagai institusi yang memberikan pengesahan terhadap tindakan ekologis yang telah berlangsung secara konsisten di masyarakat. Pembentukan Kewarganegaraan Ekologis melibatkan interaksi antara lingkungan, warga, dan negara, di mana setiap pihak memiliki peran yang saling mendukung dalam memperkuat nilai-nilai keberlanjutan.